



**Judul** : Kalau Tidak Memiliki Kinerja, Ya Dicopot  
**Tanggal** : Sabtu, 21 Oktober 2023  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 6

## Penilaian Pj Kepala Daerah Kalau Tidak Memiliki Kinerja, Ya Dicopot

ANGGOTA Komisi II DPR Guspardi Gaus mendukung kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang akan menerapkan *reward and punishment* terhadap Pejabat (Pj) kepala daerah. Gubernur, wali kota, dan bupati pantas mendapat hukuman, yang sukses diganjar penghargaan.

Guspardi mengakui penunjukan pejabat kepala daerah di beberapa wilayah ada yang memang tidak terlalu memberikan dampak bagi jalannya pembangunan di daerah. Bahkan beberapa di antaranya, disorot karena ketidakmampuannya.

Adapun beberapa Pj yang belakangan mendapat perhatian dari Masyarakat. Antara lain, Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin yang disorot lantaran kebijakan pengalokasikan 40 persen anggaran dana desa untuk pengembangan budidaya pisang seluas 2 juta hektare. Kebijakan ini ditentang oleh para kepala desa di Sulsel.

Berikutnya, Bupati Cimahi Didik Suratno Nugrahawan yang dicopot setelah dinilai gagal menjaga inflasi di daerahnya.

“Bukan hanya di situ (Pj Gubernur Sulsel dan Pj Bupati Cimahi), di Sumatera Barat (Sumbar) ada juga tuh,” kata Guspardi, kemarin.

Artinya, sambung dia, efektivitas penetapan Pj kepala daerah ini tentu harus menjadi

pembelajaran dan evaluasi bagi Mendagri sebagai pembina dan penanggungjawab terhadap para Pj kepala daerah ini.

Diharapkan, Menteri Tito semakin selektif dalam menentukan dan menetapkan para pejabat kepala daerah ini ke depan.

Mendagri dapat melakukan penilaian sekali dalam tiga bulan terhadap kinerja para Pj kepala daerah ini.

“Kalau memang tidak punya kinerja, ya harus diganti. Kan masih banyak yang berminat, punya kompetensi, kapabilitas. Artinya, banyak stok untuk mengganti orang yang tidak punya reputasi, tidak sukses, dalam memimpin sebagai Pj ini,” tegasnya.

Anggota Fraksi PAN ini menegaskan, banyak indikator yang dapat digunakan untuk evaluasi penetapan para pejabat kepala daerah ini.

Di antaranya, persoalan anggaran, pengalokasikan dana bantuan dari APBD untuk mendukung pelaksanaan Pilkada, hubungan baik dengan DPR dan birokrasi di bawahnya hingga ke desa, pencairan anggaran yang sudah disahkan oleh Pemerintah dan banyak aspek lainnya.

“Kalau kemudian dia (Pj Gubernur Sulsel) didemo oleh kepala desa, tentu ada sebabnya. Apalagi tugas Pj ini kan ada tiga, yakni tentang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. Itu tiga prinsi inti dari tugas Pj,” katanya. ■ KAL